

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Tujuan pembangunan salah satunya adalah untuk meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan kehidupan yang layak bagi semua penduduk yang pada akhirnya akan mensejahterakan rakyat Indonesia. Dapat menekan penurunan jumlah penduduk miskin merupakan salah satu bentuk keberhasilan dari pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah terus menggalakkan berbagai kegiatan pembangunan daerah terutama di daerah yang tingkat kemiskinannya relatif terus meningkat setiap tahunnya.

Menurut BPS (2011) data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi yang sangat luas ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensional, sehingga tidak mudah untuk mengukur kemiskinan dan perlu kesepakatan pendekatan pengukuran yang dipakai.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Dalam konteks

masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan pula karena hingga kini belum bisa diselesaikan dan bahkan kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. (Alfian; 2000).

Kemiskinan masih menjadi masalah di dunia terutama bagi negara berkembang. Masalah kemiskinan di negara maju adalah salah satu bagian kecil dalam komponen penduduk mereka tapi bagi negara berkembang hal ini menjadi sangat rumit karna hampir separuh dari jumlah penduduk merupakan penduduk miskin. Persoalannya sama namun tingkat kesulitan dan tingkat kerumitan masalah kemiskinan di negara maju dengan masalah kemiskinan di negara berkembang sangat berbeda.

Kemiskinan selalu menjadi kendala yang sangat sering muncul sepanjang sejarah bahkan tak pernah absen dalam setiap tahunnya. Ini dikarenakan pemerintah belum memiliki cara dan strategi yang tepat untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, strategi yang berbeda harus dibuat untuk memperkuat peran dan status perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional. Kebijakan yang dipilih harus memihak dan mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan harus selalu didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang benar, dan pemahaman yang jelas tentang akar permasalahannya.

Menerapkan otonomi daerah merupakan salah satu upaya dan strategi pemerintah pusat dalam mengentaskan kemiskinan, setiap pemerintah daerah berhak mengurus daerahnya sendiri untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di daerahnya sendiri. Ada beragam program dan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah yang hingga saat ini masih belum mampu mengentaskan masalah kemiskinan ini, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Berasa Miskin (Raskin), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai dan sebagainya.

Tingginya jumlah penduduk miskin dapat dianggap sebagai tolak ukur yang sangat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Permasalahan jumlah penduduk miskin ini juga melanda seluruh provinsi di Indonesia, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satunya. Provinsi Jawa barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak se-indonesia dari 34 provinsi lainnya, yaitu sebesar 49,31 juta jiwa. Tingginya angka penduduk di Provinsi Jawa Barat ini dapat memunculkan masalah ekonomi yang cukup serius, salah satu masalah yang cukup serius ini adalah tingginya angka jumlah penduduk miskin. Tingginya jumlah penduduk miskin ini adalah masalah yang cukup sukar untuk dipecahkan sehingga masalahnya selalu ada dari tahun ke tahun. Hal ini berkaitan dengan jumlah kepadatan penduduk Indonesia yang terus meningkat terutama di Provinsi Jawa Barat, namun kepadatan penduduk ini tidak diiringi dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan minimnya permintaan akan tenaga kerja sehingga sulit bagi penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan mereka karena tidak adanya pemasukan atau pendapatan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin yang ada di Jawa Barat angkanya mencapai 3,92 juta jiwa atau 7,88% dari total populasinya pada 2020. Angka tersebut membuat Jawa Barat termasuk dalam salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi bila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Jawa Barat berada di tempat ke 3 sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak se-Indonesia sedangkan yang paling tinggi adalah Provinsi Jawa Timur lalu tertinggi kedua adalah Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin</b>
2015	4.435.700
2016	4.224.320
2017	4.168.440
2018	3.615.790
2019	3.380.000
2020	3.920.000

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat*

Dilihat dari jumlah penduduk miskin, tertulis pada tahun 2015 penduduk miskin Kabupaten/Kota di Jawa Barat berjumlah 4.435.700 jiwa jumlahnya terus menurun hingga tahun 2019 jumlahnya menjadi 3.380.000 jiwa. Namun pada tahun 2020 angkanya naik dari tahun sebelumnya menjadi 3.920.000. Hal ini juga sangat mungkin dikarenakan tingginya tingkat pengangguran terbuka sehingga membuat jumlah penduduk miskin meningkat.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, karena tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Pendidikan menitikberatkan pada pengembangan

pengetahuan, pengalaman dan keterampilan manusia serta pekerja dalam proses pembangunan.

Pendidikan telah menjadi bagian penting bagi suatu bangsa dan juga seluruh lapisan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang disebut dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Peneliti memilih rata-rata lama sekolah sebagai indikator pendidikan karena rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. (*Sistem Informasi Rujukan Statistik - View Indikator*, n.d.)

**Tabel 1.2 Pendidikan (RLS) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)</b>
2015	7,86
2016	7,95
2017	8,14
2018	8,15
2019	8,37
2020	8,55

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat*

Dapat dilihat bahwa pendidikan (RLS) di Jawa Barat pada tahun 2015-2020 mengalami kenaikan jumlah setiap tahunnya, pada tahun 2015 angka banyaknya

tahun yang di tempuh penduduk dalam menjalankan pendidikan yaitu rata-ratanya adalah selama 7,86 tahun terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2020 rata-rata penduduk Jawa Barat menempuh pendidikan selama 8,55 tahun.

Penyebab kemiskinan lainnya adalah pengangguran. Meningkatnya angka pengangguran telah menimbulkan masalah besar, terutama di negara-negara berkembang. Pengangguran yang berlangsung cukup lama dan berkelanjutan akan menyebabkan turunnya kesejahteraan masyarakat, karena tidak ada pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga rasio ketergantungan antara pekerja dan pengangguran tinggi.

Indikator yang digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), karena pemerintah sering menggunakan indikator utama ini untuk mengukur keberhasilannya di bidang ketenagakerjaan, terutama Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk mengukur tingkat pengangguran, dimana TPT adalah rasio dari total pengangguran terhadap total angkatan kerja.

**Tabel 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>
2015	8,72
2016	8,89
2017	8.22
2018	8,23
2019	8,04
2020	10,46

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat*

Selanjutnya juga dapat dilihat tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 8,72% kemudian angkanya meningkat pada tahun 2016 menjadi 8,89%. Angka tingkat pengangguran terbuka meningkat sangat mungkin dikarenakan meningkatnya jumlah angkatan kerja sedangkan lapangan pekerjaan tetap atau

bahkan menurun membuat angkatan kerja tidak dapat diserap karena rasio nya tidak seimbang. Tahun-tahun selanjutnya angka menurun hingga pada tahun 2020 angka pengangguran terbuka kembali meningkat, kemungkinan penyebabnya disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia hingga melumpuhkan beberapa sector termasuk ekonomi hingga banyak sekali angkatan kerja yang tidak terserap bahkan banyak pula para pekerja yang kehilangan pekerjaannya.

Pertumbuhan ekonomi juga dapat dikatakan sebagai faktor penyebab kemiskinan karena merupakan salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam kurun waktu tertentu tidak dapat menstabilkan keadaan di suatu wilayah. Secara makro pertumbuhan ekonomi yaitu peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) yang berarti pendapatan wilayah tersebut mengalami kenaikan.

Pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di suatu wilayah. Pertumbuhan itu sendiri merupakan peningkatan jangka panjang dalam output per kapita yang disertai aspek-aspek dinamis dari perekonomian.

**Tabel 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2015-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>
2015	5,05
2016	5,66
2017	5,33
2018	5,66
2019	5,07
2020	2,97

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat*

Dapat diketahui pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat mengalami naik turun karena berbagai faktor, dapat dilihat pada tahun 2017 angka pertumbuhan ekonomi menurun dari 5,66% menjadi 5,07% hal ini terjadi karena *base effect*, dimana Jawa Barat sedang menyelenggarakan PON XIX pada triwulan III 2016. Lalu, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi angkanya kembali mengalami penurunan sebesar 0,59% dari tahun sebelumnya, ini kemungkinan terjadi karena suasana politik dalam negeri karena sedang berlangsung Pemilihan Presiden (PilPres) pada tahun itu sehingga para pelaku usaha memilih strategi *wait and see*. Pada tahun 2020 angkanya kembali menurun, kemungkinan alasan dari menurunnya pertumbuhan ekonomi lagi lagi dikarenakan adanya pandemik Covid-19 seperti variabel sebelumnya yaitu tingkat pengangguran terbuka. Penduduk tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa akibat pandemic Covid-19 ini hingga aktivitas ekonomi pun sangat terbatas membuat pertumbuhan ekonomi juga menurun.

Berdasar pada uraian yang telah penulis jabarkan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang ***“Pengaruh Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2002-2020”***.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sebagaimana latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat tahun 2002-2020.
2. Bagaimana pengaruh pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat tahun 2002-2020.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi, maka penulis menetapkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat tahun 2002-2020.
2. Pengaruh pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat tahun 2002-2020.

### **2.1 Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan kegunaan:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan bahan referensi yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu ekonomi pembangunan.

2. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tidak hanya teori yang didapat selama kuliah namun juga dengan praktiknya langsung dilapangan, sehingga peneliti dapat menemukan perbandingan antara teori dan kenyataan langsung yang terjadi di lapangan.

### 3. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah dalam hal perumusan ataupun pembuatan kebijakan pembangunan ekonomi yang dapat membuat kesejahteraan masyarakat meningkat.

### 4. Bagi Lembaga/Fakultas Ekonomi

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber untuk perkuliahan khususnya di Jurusan Ekonomi Pembangunan dan juga diharapkan memperkaya penelitian sejenis yang pernah diteliti sehingga dapat digunakan oleh teman-teman mahasiswa sebagai bahan perbandingan jika mengadakan penelitian dengan permasalahan yang sama atau serupa.

### 5. Bagi pihak lain

Diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan kegunaan bagi peneliti lain sebagai bahan perbandingan juga petunjuk pada masalah yang serupa ataupun sebagai masukan bagi pihak lain yang membutuhkan.

## **1.5 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan melalui situs BPS Provinsi Jawa Barat, karena untuk mengetahui seperti apa dan sejauh mana pengaruh Pendidikan,

tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin dan juga agar mendapatkan data untuk menunjang usulan penelitian ini.

### **1.6 Jadwal Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini sejak bulan April 2021 hingga bulan April 2022, yang dimulai dengan pengajuan judul kepada pihak Program Studi Ekonomi Pembangunan dan diakhiri dengan ujian skripsi dan komprehensif. Berikut ditampilkan tahapan pelaksanaan penelitian secara detail pada tabel 1.5.

No.	Kegiatan	Tahun 2021-2022																																			
		April		Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April	
		1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2				
1	Pengajuan Judul																																				
2	Pengumpulan Data																																				
3	Penyusunan UP																																				
4	Seminar Usulan Penelitian																																				
5	Pengolahan Data																																				
6	Penyusunan Skripsi																																				
7	Ujian Skripsi dan Komprehensif																																				

Tabel 1. 5 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

